

ABSTRAK

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dan buruh setelah adanya perjanjian kerja yang memuat unsur hak dan kewajiban para pihak. Dalam era modern ini hubungan kerja tidak hanya terjadi antara pengusaha dan pekerja lokal saja, tetapi juga terjadi pada pengusaha/perusahaan yang ada di Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemutusan Hubungan Kerja terjadi tidak hanya karena pengurangan pekerja saja, tetapi juga karena pekerja melakukan kesalahan berat ataupun perusahaan pailit. Namun dalam praktik lapangannya sering terjadi tindakan diskriminasi pengusaha terhadap pekerja mengakibatkan perselisihan hingga berujung PHK. Bahkan adakalanya perusahaan melakukan PHK secara sepihak tanpa prosedur ketentuan ketenagakerjaan. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan apakah penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai pekerja di PT. X telah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja sepihak di PT.X

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penggunaan TKA di PT.X dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK sepihak. Metode penelitian ini adalah empiris yang didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang meliputi hasil wawancara dengan masyarakat dan data sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait, dokumen resmi, buku penerbitan/media masa, jurnal hukum dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan subjek dan objek yang ditemukan dalam penelitian

PT.X menggunakan TKA dalam proses produksi wajib mendahulukan pekerja lokal dan memiliki RPTKA yang telah disetujui oleh pejabat yang ditunjuk. RPTKA merupakan syarat untuk mendapatkan IMTA.Selanjutnya jika terjadi PHK sepihak perusahaan PT.X wajib memberikan perlindungan hukum berupa hak-hak normatif yaitu uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam praktiknya pekerja yang diPHK oleh PT.X hanya mendapatkan upah sekali gaji dan uang BPJS.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRACT

Work relationship is a relationship between workers and laborers after an employment agreement that contains elements of the rights and obligations of the parties. In this modern era, employment relations do not only occur between employers and local workers, but also occur in employers / companies in Indonesia and Foreign Workers (TKA). Termination of employment occurs not only because of a reduction in workers, but also because workers have made a serious mistake or a bankrupt company. However, in practice the employer often discriminates against workers resulting in disputes that lead to layoffs. In fact, sometimes companies do unilateral layoffs without labor provisions procedures. So that in this study can be formulated whether the use of Foreign Workers (TKA) as workers at PT. X complies with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and how the legal protection of workers for termination of unilateral employment at PT.X.

This study aims to determine the procedures for the use of foreign workers at PT.X and legal protection for workers who were laid off unilaterally. This research method is empirical based on facts that occur in the field. The research data used are primary data which includes the results of interviews with the community and secondary data which includes related literatures, official documents, daybooks / mass media, legal journals and research results in the form of reports. Analysis of the data used in this study is descriptive, which describes and explains the subjects and objects found in the study.

PT.X uses TKA in the production process must prioritize local workers and have an RPTKA that has been approved by the appointed official. The RPTKA is a requirement for obtaining an IMTA. Furthermore, if a unilateral layoff occurs, the company PT.X is required to provide legal protection in the form of normative rights, namely severance pay, compensation payments and years of service according to the provisions of the Manpower Act. But in practice, workers laid off by PT.X only get a one-time salary and BPJS money.

Keywords: Foreign Workers, Termination of Employment